

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pemanfaatan aplikasi Sistem Informasi Partai Politik (SIPO) dalam meningkatkan tata kelola pemilu melalui penggunaan teknologi informasi di KPU Kabupaten Asahan pada tahun 2024. Latar belakang penelitian ini didasari oleh tuntutan akan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam proses penyelenggaraan pemilu, di mana digitalisasi dianggap sebagai langkah strategis yang perlu dioptimalkan hingga tingkat lokal. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam terhadap pihak KPU, Bawaslu, dan perwakilan partai politik di Kabupaten Asahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan SIPO membawa dampak positif dalam proses digitalisasi administrasi partai politik, seperti pendaftaran, verifikasi keanggotaan, kepengurusan, dan domisili partai. SIPO juga membantu penyelenggara pemilu dalam menciptakan tata kelola yang lebih terstruktur, efisien, serta membuka akses data secara transparan dan real-time. Namun demikian, ditemukan sejumlah kendala yang menghambat efektivitas sistem, antara lain keterbatasan infrastruktur jaringan internet, rendahnya literasi digital di kalangan pengguna, kurangnya sosialisasi sistem, serta gangguan teknis sistem dan ancaman keamanan data. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun SIPO telah menunjukkan potensi besar dalam meningkatkan tata kelola pemilu, upaya peningkatan efektivitasnya masih harus dilakukan secara menyeluruh, seperti melalui pelatihan sumber daya manusia, perbaikan infrastruktur teknologi informasi, dan strategi komunikasi publik yang lebih masif. Temuan ini juga menegaskan pentingnya kolaborasi antara KPU, pemerintah daerah, dan partai politik untuk mendorong transformasi digital yang adaptif dan berkelanjutan dalam proses pemilu.

Kata Kunci: SIPO, teknologi informasi, tata kelola pemilu, KPU, Kabupaten Asahan.

ABSTRACT

His study aims to analyze the effectiveness of the Political Party Information System (SIPOL) application in enhancing election governance through the use of information technology at the Asahan Regency General Election Commission (KPU) in 2024. The study is driven by the growing need for transparent, efficient, and accountable election administration, in which digitalization is seen as a strategic solution that must be optimized even at the local level. This research employs a qualitative descriptive method, using in-depth interviews with officials from KPU, Bawaslu, and representatives from political parties in Asahan Regency. The results indicate that the implementation of SIPOL has had a positive impact on the digitalization of political party administration, particularly in registration, membership verification, leadership data, and party office documentation. SIPOL has supported election organizers in establishing a more structured and efficient system, enabling real-time data access and increased transparency. However, several obstacles were identified that hinder the application's effectiveness, including limited internet infrastructure, low digital literacy among users, inadequate public outreach, system disruptions, and data security concerns. The study concludes that while SIPOL demonstrates great potential in improving election governance, comprehensive efforts are still needed to maximize its effectiveness. These include human resource training, improvements in IT infrastructure, and more extensive public communication strategies. The findings also highlight the importance of collaboration between the KPU, local government, and political parties to promote a sustainable and adaptive digital transformation in the electoral process.

Keywords: *SIPOL, information technology, election governance, KPU, Asahan Regency.*